

Dimensi Ideologi dan Politik*

A.M.W. Pranarka

MUNCULNYA gagasan yang dituangkan dalam berbagai penerbitan, seperti *Powershift* dari Alvin Toffler, *Power Management* dari Brewer, Ainsworth dan Wynne, *Managing in Turbulent Time* dari Peter Drucker, serta *The Strategy of Mastering Change*, nampaknya merupakan bagian dari gelombang perubahan besar yang sedang terjadi di dunia dewasa ini.

Kesadaran sejarah manusia menjadi makin meningkat dan dipacu untuk menjawab pertanyaan sekitar ke manakah arah sejarah, karena manusia melihat sejarah sebagai perubahan. Manusia melihat perubahan itu terjadi karena adanya kekuatan yang menggerakkan dan mengubahnya. Mengetahui kekuatan dan mengubah sejarah, terutama menguasai dan mengelolanya merupakan kebutuhan yang makin dirasakan urgensinya.

Kesadaran sejarah bukanlah hal yang baru. Evolucionisme yang menggelombang beberapa abad lalu telah mengawali proses tersebut. Manusia telah lama ingin menemukan hukum evolusi alam semesta maupun evolusi masyarakat dan kebudayaan. Auguste Comte, bapak sosiologi modern, bercita-cita membangun ilmu mengenai masyarakat untuk mengenali hukum-hukum yang mengatur gerak gelombangnya masyarakat. Demikian pula halnya dengan Karl Marx. Ia berusaha membangun pemahaman ilmiah mengenai sejarah dan masyarakat, dan lebih daripada itu bercita-cita untuk menguasai arah sejarah dan mengelola perubahan.

Gejala membesarnya perhatian manusia terhadap arah sejarah dan penguasaan atas kekuatan-kekuatan yang membentuk sejarah itu menunjukkan, bahwa alam pikiran manusia nampaknya telah menjadi semakin bersifat ideologik. Saat itu ada gejala terjadinya transformasi pemikiran dari suasana ilmiah ke suasana ideologi.

Melalui perkembangan dan pengembangan ilmu, manusia berupaya menjawab

*Makalah ini disajikan dalam Seminar Sehari, Peringatan 20 Tahun CSIS, "Menuju Satu Kebudayaan? Nasionalisme dan Internasionalisme di Persimpangan Jalan," yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Agustus 1991.

pertanyaan: *What do you know?* Akan tetapi melalui pengembangan dan perkembangan ideologi, manusia bergumul untuk menjawab pertanyaan: *What do you want?* Kemauan manusia untuk mengenal kekuasaan sebagai kekuatan sejarah dan perubahan supaya dapat mengelola dan menguasainya, tentulah lebih menampilkan dimensi ideologi daripada dimensi ilmiah.

Dalam ideologi, manusia bergumul dengan konsepsi dan sekaligus dengan aksi, serta dengan aspirasi dan sekaligus juga dengan kekuasaan. Konsepsi dan aspirasi dapat dipandang merupakan aspek kognitif dan psikomotoriknya, sementara aksi dan kekuasaan adalah wahana melalui mana manusia berjuang dengan konsepsi dan aspirasi itu agar dapat menemukan wujud yang aktual dan struktural.

Ideologi

Kalaupun melalui ideologi manusia bergumul dengan pertanyaan *What do you want*, tidaklah berarti bahwa ideologi merupakan suatu konsep yang sederhana. Ideologi telah tumbuh menjadi konsep yang majemuk dan juga bergerak terus.

Dalam bukunya yang berjudul *Histoire des Ideologies*, Chatelet mengatakan *l'ideologie est, a tout le moins, une notion confuse*. (Ideologi, sedikit-banyak, adalah suatu gagasan kabur) Betapa tidak, menurut Ludwig Feuerbach, ideologi adalah representasi kolektif dan proyeksi imajiner dalam situasi yang sama sekali berlawanan, karena itu tidak mungkin terwujud. Karl Marx menggambarkan ideologi sebagai sistem intelektual, legitimasi moral dan bagaikan semerbaknya alam spiritual berupa alat ciptaan penguasa untuk mempertahankan ke-

kuasaannya terhadap kelas yang dikuasai. Dengan kata lain, ideologi merupakan pa-yung ataupun bangunan atas dari struktur kekuasaan. Sedangkan bagi Althusser, ideologi adalah retorika yang tidak mungkin menjadi legitimasi konseptual, dia hanyalah ekspresi ataupun rumus untuk menutupi pamrih maupun kepentingan suatu kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Namun apabila kita memperhatikan sejarah konsep-konsep ideologi selama zaman modern ini, dapatlah dikatakan bahwa ideologi mencakup konsepsi dan aspirasi kolektif, yang berorientasi pada aksi, untuk menjadikan aspirasi dan konsepsi tersebut menjadi aktual terwujud melalui struktur kekuasaan. Maka ideologi itu akan selalu mempunyai hubungan dengan aspek kognitif intelektual, aspek psikomotorik emosional, dan kekuasaan sebagai aspek struktural. Dengan perkataan lain, ideologi menyentuh bukan hanya kekuatan intelektual manusia melainkan juga manusia secara total.

Ketika Destut de Tarcy menggunakan istilah ideologi untuk pertama kalinya, nampaknya unsur-unsur aspirasi dan konsepsi dan bahkan unsur kekuasaan juga sudah mewarnainya. Dipengaruhi oleh alam pikiran Aufklärung serta diresapi aspirasi aliran idealisme untuk membangun satu sistem intelektual yang semesta, memang terbawa pula keinginan agar dapat menguasai dan mengelola segala sesuatu. Tujuan dan cita-citanya adalah menguasai dan mengelola semesta. Karena semesta itu merupakan proses dan produk dari gagasan dan wawasan, maka perlu dibangun satu ilmu yang memuat segala gagasan dan wawasan. Melalui ilmu itu, yang olehnya disebut ideologi, semesta tidak saja dapat dipahami akan tetapi

juga dikuasai.

Aspek konsepsi, aspirasi dan kekuasaan jelas menjadi makin kentara dalam konsep yang ditemukan oleh Karl Marx. Namun motivasi dasarnya kiranya sama: Marx ingin menemukan sistem intelektual melalui mana dapat diketahui hukum masyarakat dan kemudian dapat menguasai serta mengelola arah sejarah masyarakat itu.

Marx melihat evolusi masyarakat terjadi dalam sejarah, yang dibentuk oleh benturan-nya kekuatan yang satu melawan yang lain, kekuasaan yang satu melawan yang lain. Marx melihat ekonomi sebagai basisnya struktur kekuasaan. Apabila kekuasaan telah menjadi struktural, maka penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui upaya membangun berbagai sistem. Sistem yang memayungi kekuasaan ini, yang disebut sebagai suprastruktur kekuasaan, meliputi antara lain ilmu pengetahuan, filsafat, politik, hukum, agama dan ideologi.

Konsep Masyarakat, Negara dan Kekuasaan yang Diperjuangkan

Dari ulasan sekilas di atas dapat dikemukakan bahwa ideologi akan selalu memuat konsep masyarakat, konsep negara, dan konsep kekuasaan yang menjadi cita-cita perjuangan. Ideologi dapat menjadi konsepnya *establishment*, tetapi juga dapat menjadi konsepnya *anti-establishment*.

Sejarah ideologi mengungkapkan betapa manusia telah melakukan petualangan sejarah melalui konsep-konsep masyarakat, negara dan kekuasaan. Ada saatnya manusia hanya melihat pada faktor-faktor yang membentuk kekuasaan, dan kemudian membuatnya menjadi cita-cita dan konsep

tunggalnya. Ada juga saat manusia melihat bahwa kekuasaan itu menyangkut manusia dan masyarakat, sehingga manusia bertanya: untuk siapakah kekuasaan itu dan untuk apa kekuasaan itu? Tetapi ada saat pula manusia memusatkan perhatian pada kekuasaan yang tertinggi atau hal kedaulatan, sehingga manusia bertanya: untuk siapa, di tangan siapa, untuk apa dan bagaimana struktur dan legitimasinya?

Sekilas Singkat Sejarah Ideologi Modern

Dari Sejarah Eropa kita dapat melihat bagaimana manusia ternyata harus mengalami pergumulan panjang dalam petualangan di medan ideologi. Zaman Modern yang merupakan gelombang reaksi terhadap kejenuhan sistem masyarakat, negara dan kekuasaan dalam Abad Pertengahan telah melahirkan ideologi yang pada dasarnya anti agama dan anti monarki. Muncullah dalam tahap awalnya ideologi-ideologi pengetahuan. Konsep sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar ideologi keagamaan digantikan dengan konsep sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar pengetahuan manusia. Chatelet menyebut ini sebagai arus gelombangnya "l'ideologie de savoir, the ideology of knowledge". Manusia melihat pengetahuan sebagai satu-satunya faktor penentu dalam segala sesuatu. Sistem kekuasaan harus dibangun atas pengetahuan, dan segala sesuatunya haruslah ditunjukkan, dikuasai dan dikelola oleh pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi faktor legitimasi.

Dari ideologi pengetahuan itu, muncul arus-arus konsepsi dan aspirasi seperti misalnya: rasionalisme, idealisme dan positivisme. Rasionalisme mengaspirasikan agar masyarakat, negara dan sistem kekuasaan di-

bangun atas dasar ratio sebagai satu-satunya acuan. Idealisme merupakan konsep dan aspirasi yang mencita-citakan sistem semesta yang bersifat total berdasarkan atas gagasan. Sedangkan positivisme membawakan konsep dan aspirasi untuk membangun sistem masyarakat, negara dan kekuasaan atas dasar ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya acuan. Dalam perkembangan seperti itu, ratio, gagasan dan ilmu telah dijadikan ideologi.

Memudarnya ideologi Abad Pertengahan yang dibangun atas dasar ideologi keagamaan dan monarki dengan sendirinya menguatkan kesadaran akan kemerdekaan dan posisi individu. Karenanya kelahiran Abad Modern pada awalnya juga memacu tumbuhnya sistem kekuasaan dan konsep serta aspirasi kemasyarakatan dan kenegaraan yang dibangun atas dasar kemerdekaan dan individu sebagai acuan tunggalnya. Maka, lahirlah gelombang ideologi liberalisme dan individualisme.

Memudarnya ideologi keagamaan dan tumbuhnya ideologi-ideologi anti ideologi keagamaan menyebabkan terjadinya dua arus dominan yang bertentangan satu dengan lainnya: teokrasi keagamaan sebagai ideologi di satu pihak dan sekularisme anti keagamaan (yang dalam perkembangannya akan menjadi sekularisme ateistik) di lain pihak. Namun demikian kedua arus dominan ini pun akan mengalami perpecahan internal, terutama karena terjadinya perpecahan antara Katolisisme Roma di satu pihak dan Protestanisme, yang antara lain melahirkan ideologi "cuius regio illius est religio" (daerah manapun ada agamanya sendiri) yang pada intinya menekankan sistem kekuasaan yang didasarkan pada ideologi keagamaan setempat. Sekularisme sendiri juga akan mengalami perpecahan dengan

munculnya berbagai ideologi sebagaimana dikemukakan di atas, dan ini masih akan berkelanjutan terus.

Mengelombangnya rasionalisme, idealisme dan positivisme, bersamaan dengan liberalisme dan individualisme, yang masing-masing menjadi aliran ideologi totaliter satu dimensional, menyebabkan konflik dan keterpecahan yang tidak berkesudahan. Belum lagi ditambah dengan konflik antara ideologi monarki (kerajaan) di satu pihak dengan ideologi anti-monarki di lain pihak. Rasionalisme sendiri ternyata mengelombangkan dua aliran: yang satu menentang monarki absolut (John Lock), yang lainnya menerima monarki absolut yang didasarkan pada teori kontrak sosial.

Revolusi Perancis kiranya dapat dipandang sebagai letusan ideologi liberalis, individualis, anti agama dan anti monarki. Dari sinilah menggelombang ideologi republik dan ideologi demokrasi: *liberte, egalite, dan fraternite*.

Benturan aliran-aliran disertai dengan konflik-konflik yang tidak berkesudahan itu menyebabkan orang mencari konsep dan aspirasi baru: ada aliran yang membuat negara menjadi ideologi (*etatisme*), ada aliran yang membuat hukum sebagai ideologi (kedaulatan hukum).

Terjadinya Revolusi Industri dengan permasalahan yang dibawanya menyadarkan orang pada ekonomi sebagai ideologi. Di sini pun terjadi keterpecahan antara ideologi ekonomi yang liberal dan individualistik di satu pihak dengan ideologi ekonomi yang bersifat kolektivistik dan sosialistik di lain pihak. Inti permasalahan yang dihadapi aliran ini adalah apa yang oleh Chatelet disebut sebagai "l'ideologie de l'ordre" (ideologi penataan). Maka sistem penataan

muncul sebagai asumsi dasar ideologi-ideologi itu: membiarkan evolusi kemasyarakatan berjalan secara liberal (*laissez faire laissez passer*) atau sistem kemasyarakatan yang berjalan secara tertata ketat dan ter-pimpin.

The ideology of Knowledge, the ideology of Wealth, dan the ideology of Power kiranya merupakan manifestasi dari gelombang-nya aliran ideologi non-keagamaan di Eropa yang amat dominan. Gelombang tersebut tentulah memacu berbagai kekuatan untuk membangun sistem kekuasaan berdasarkan atas kekayaan dan kekuasaan. Hal ini telah menimbulkan merkantilisme sampai pada usaha ekspansi kekuasaan dan kekayaan tersebut ke dalam bentuk kolonialisme modern, yang mungkin sudah dapat kita pandang sebagai gejala awal dari globalisasi yang ada sekarang ini.

Semua ideologi yang lahir menginspirasi terjadinya suatu masyarakat negara dan sistem kekuasaan yang total semesta bahkan final. Permasalahan yang dihadapi oleh ideologi-ideologi modern itu antara lain adalah menemukan dan membangun sistem strukturalnya. Dan karena masing-masing aliran bersifat dogmatik satu dimensional, apalagi alam pikiran Eropa amat diwarnai oleh pendekatan dialektika negatif saja, maka semuanya bermuara pada benturan konflik yang terus-menerus, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil.

Sebagai bagian dari perkembangan tersebut lahirlah nasionalisme di Eropa sebagai ideologi. Nasionalisme di Eropa pada awalnya amat diwarnai oleh pengelompokan daerah, lalu memadu dengan pengelompokan negara dan tidak jarang pengelompokan bahasa. Dalam hal ini, nasionalisme juga merupakan suatu ideologi yang satu dimensional dan diskriminatif sifatnya.

Tidaklah mengherankan apabila nasionalisme kemudian dibangun dan dipadukan dengan dukungan kekuatan bersenjata (ideologi fasis) dan lebih lanjut dipadukan dengan konsep ras (nasional-sosialisme Hitler).

Mengelombangnya aliran-aliran ideologi tersebut kiranya telah menimbulkan berbagai guncangan yang terus-menerus: sejak dari perang keagamaan, perang antara negara-negara Eropa (Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol, Austria, dan lain sebagainya), Revolusi Perancis, Revolusi Industri, perang memperebutkan jajahan sampai akhirnya meletus Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Gelombang Ideologi Sejak Perang Dunia II

Situasi Perang Dunia II masih dilanda oleh luapan imbas aliran ideologi-ideologi sebelumnya. Hal ini menggejala antara lain dalam suasana konflik bipolar antara Barat dan Timur; antara liberalisme-individualisme-kapitalisme di satu pihak dengan kolektivisme-totaliterisme-sosialisme di lain pihak.

Namun demikian situasi setelah Perang Dunia II itu juga diwarnai oleh terjadinya aliran baru yang mempunyai aspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu sistem-sistem ideologi lama. Manusia menyadari betapa sejarah sebelum Perang Dunia II itu telah terperangkap dan dikuasai oleh berbagai sistem kekuasaan, yang merupakan aliran-aliran ideologi yang amat banyak dan saling berbenturan, yang masing-masing berusaha menancapkan kedaulatannya atas eksistensi manusia dan semesta. Manusia tidak hanya harus membebaskan diri dari sistem ideologi keagamaan dan ideologi monarki absolut

Abad Pertengahan, tetapi harus juga membebaskan diri dari berbagai sistem yang lahir dari "the ideology of knowledge", "the ideology of wealth" dan "the ideology of power", dalam segala bentuk sekaligus mengatasi strukturnya.

Situasi setelah Perang Dunia II itu telah menggelombangkan ideologi anti sistem sebagai suatu aliran dominan: anti sistem keagamaan, anti sistem intelektual, anti sistem kemasyarakatan, anti sistem politik, anti sistem negara, anti sistem kekuasaan, anti sistem ideologi, dan bahkan menggejala menjadi sebuah aliran yang melancarkan gugatan serta penentangan terhadap segala sistem. Gelombang ini muncul ke permukaan di sekitar tahun 50-an dan 60-an. Eksistensialisme merupakan salah satu pemacu gerakan ini.

Suasana anti sistem tersebut nampaknya telah membawa pula aspirasi untuk memperjelas konsep-konsep dasar, khususnya mengenai pengetahuan manusia. Orang membuat diferensiasi antara ilmu dan ideologi, ilmu dan falsafat, falsafat dan ideologi, begitu pula halnya dengan teologi.

Gelombang ideologi anti sistem ini juga memberikan kritik dan gugatan tajam, baik kepada blok Barat maupun blok Timur. Inilah yang kemudian ikut memacu perkembangan gagasan-gagasan Neo Marxis yang banyak berkembang pada dekade 1970 dan 1980-an, namun menjadi surut memasuki dekade 1990-an terakhir ini.

Walaupun demikian secara diam-diam namun dengan langkah pasti, arus dasar dari "the ideology of knowledge", "the ideology of wealth" dan "the ideology of power" membangun pertumbuhan yang makin kuat. "The ideology of knowledge" tidak lagi tumbuh dalam jalur ilmu, teologi, falsafat

ataupun ideologi, melainkan tumbuh melalui jalur teknologi. Terjadi titik konvergensi antara ilmu, teknologi dan kemudian juga ideologi, terutama karena teknologi itu menjadi terpadu pula dengan tumbuhnya "the ideology of wealth" dan "the ideology of power". "Technology-wealth-power" merupakan paduan peradaban yang tumbuh menjadi makin kuat, dan menjadi ciri utamanya kekuasaan dalam alam modern setelah Perang Dunia II. Tentulah perkembangan ini tidak tanpa kritik serta gugatan, sebagaimana terasa dari gagasan Marcuse, gerakan anti elitisme dan aliran Neo-Marxis. Bagi sementara orang teknologi sempat muncul sebagai ideologi. Ini terjadi di tahun 1970-an, yaitu teknologi merupakan faktor pembentuk kekuasaan.

Gelombang inilah kiranya yang telah memacu tumbuhnya negara-negara industri, satu dan lain hal menjadi penyebab terjadinya perubahan dari situasi bipolar menjadi situasi multipolar. Bahkan dengan adanya aspirasi dan konsep kekuasaan yang secara sadar dibangun atas teknologi dan ekonomi itulah terjadilah revolusi industri gelombang ketiga, dan gelombang globalisasi yang mengguncang perubahan-perubahan dewasa ini.

Dengan demikian dapatlah diangkat suatu kesimpulan betapa sejarah modern (Eropa) sejak abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 dewasa ini telah melahirkan begitu banyak sistem ideologi seperti misalnya: ideologi keagamaan, ideologi kerajaan, ideologi keturunan, ideologi pengetahuan yang muncul dalam bentuk ilmu, filsafat, sistem-sistem intelektual dan kemudian teknologi, ideologi kekuatan yang muncul dalam wujud ideologi kekuatan bersenjata, ideologi negara, ideologi pemerintah, ideologi ekonomi, ideologi kemerdekaan, ideolo-

gi individu, ideologi masyarakat, ideologi ras, ideologi penataan dan ideologi dominasi.

Situasi Saat Ini

Munculnya gelombang ideologi anti sistem intelektual pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan kemudian ideologi anti sistem struktural (1960-an dan 1980-an) membawa sumbangan dalam perkembangan sejarah ideologi, yaitu adanya suasana yang menjadi lebih kritis dan lebih reflektif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manusia mulai menyadari dan menggugat betapa dirinya telah diperbudak oleh sistem-sistem ideologi yang dibuat oleh manusia sendiri. Suasana ideologi yang amat majemuk serta perebutan dominasi antara yang satu dengan yang lain memang menggambarkan keadaan yang telah lama dirasakan sebagai suasana *belum omnium contra omnes* (peperangan antara semua manusia melawan semua manusia pula) dan suasana *exploitation de l'homme par l'homme* melalui gejolaknya sistem-sistem ideologi tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manusia mulai bertanya dan menggugat: apakah manusia itu untuk sistem ataukah sistem untuk manusia; apakah agama untuk manusia ataukah manusia untuk agama; apakah negara untuk manusia ataukah manusia untuk negara, dan demikian seterusnya terhadap ilmu, falsafah, ekonomi, sistem penataan masyarakat, konsep negara, konsep masyarakat dan industri serta teknologi.

Gelombang yang membawa suasana reflektif kritis tersebut juga menyadarkan manusia betapa perlunya memahami diferensiasi antara ilmu dan ideologi, falsafah, teologi, dan agama sehingga pada tahun 1960-

an orang banyak disibukkan dengan pertanyaan: seberapa jauh ilmu itu mempunyai sifat bebas nilai.

Gelombang kesadaran kritis reflektif ini nampaknya membawa keinginan dan aspirasi untuk menempatkan segala sesuatunya itu pada manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggal dalam konsep penataan dan penguasaan masyarakat, negara, sejarah dan semesta. Walaupun aspirasi untuk menjadikan manusia acuan tunggal ini sudah menggejolak pada tahun 1950-an, namun karena lebih dilanda dengan aspirasi anti sistem dan anti struktur di samping tetap berhadapan dengan tumbuhnya sistem ideologi yang dibangun atas dasar "knowledge-wealth-power" dengan terjadinya revolusi industri kedua dan mencuatnya teknologi, maka barulah ketika pada akhir 1980-an dan awal 1990-an nampaknya terjadi gejala bangkitnya lagi aspirasi membuat manusia dan kemanusiaan menjadi acuan tunggal. Hal ini satu dan lain hal juga dipacu oleh kesadaran betapa petualangan dan benturan berbagai sistem tersebut terjadi karena manusia lebih membangun geraknya sistem-sistem tersebut atas dasar basis dialektika negatif dan kurang berusaha membangun atas dasar basis dialektika positif.

Situasi dewasa ini mungkin masih diwarnai oleh berbagai suasana yang ikut mewarnai gelombang perubahan besar dewasa ini, seperti:

- suasana yang masih diwarnai oleh mereka yang berpegang pada ideologi-ideologi lama yang timbul dari "the ideology of knowledge", khususnya pengaruh idealisme dan positivisme berdampingan dengan ideologi kemerdekaan, ideologi individu, ideologi penataan kolektif. Demikianlah manusia masih bergumul dengan

liberalisme, individualisme, dan sosialisme;

- suasana ideologi keagamaan, walaupun proses diferensiasi telah berkembang, manusia telah mulai membedakan konsep Tuhan, konsep agama, konsep ideologi, dan manusia masih didorong untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai: *the essence of religion*, sehingga kegiatan agama lebih menyadari dirinya sebagai kekuatan spiritual, etis dan moral;

- suasana ideologi ekonomi (industrialisasi dan sistem keuangan) yang terpadu dengan teknologi serta kekuasaan;

- suasana yang mengaspirasikan tumbuhnya ideologi baru yang dibangun atas pengalaman sejarah masa lampau untuk dapat menguak perjalanan sejarah umat manusia di masa mendatang dengan menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggalnya.

Kiranya dapat dikatakan bahwa gelombang globalisasi serta suasana perubahan besar yang sedang kita alami dewasa ini dari satu pihak merupakan muara dari gelombang-gelombang ideologi di masa lampau itu, dan dari lain pihak merupakan kelanjutan dari aspirasi untuk dapat mengadakan loncatan transendental dari absurditas ideologi-ideologi yang secara terus-menerus mendatangkan benturan perebutan dominasi dan pertentangan-pertentangan.

Keterlibatan dalam situasi seperti itulah yang mengakibatkan banyak perhatian ditujukan pada masalah arah sejarah, dan karena itu pada kekuatan-kekuatan sejarah dan perubahan, dalam arus aspirasi dasar untuk dapat mengelola perubahan dan menguasai arah sejarah. Inilah yang menyebabkan kita mungkin dapat berkata, bahwa situasi alam pikiran dewasa ini justru tumbuh berkembang menjadi makin bersifat ideologik.

Dari sejarah ideologi itu pun kiranya kita dapat mengangkat sebuah kesimpulan, bahwa hakikat ideologi (*the essence of ideology*) terletak pada: adanya aspirasi kolektif untuk memperjuangkan konsep dan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan. Kita perlu membedakan antara dinamika esensial dari ideologi di satu pihak dengan bentuk-bentuk aktualisasi, baik secara doktriner maupun secara struktural, di lain pihak; ideologi sebagai isi dan ideologi sebagai bentuk.

Apa yang terjadi di Uni Soviet saat ini kiranya adalah perubahan ideologi sebagai bentuk, sedang ideologi sebagai isi adalah tetap adanya konsep dan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan yang ingin diperjuangkan oleh lapisan pembaharu di negeri itu. Beberapa waktu yang lalu komunisme dirasakan dapat menjadi bentuk aktualisasi dari isi ideologi perjuangan Rusia. Namun gelombang ideologi teknologi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan dunia memaksa dilepaskannya bentuk doktriner maupun struktural, namun demikian aspirasi ideologi dasarnya tentulah tetap sama: cita-cita perjuangan Rusia mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan, baik dalam skala dalam negeri maupun dalam skala global.

Situasi dewasa ini memang masih amat fluktuatif. Negara-negara industri tentulah tetap membangun sistemnya atas dasar teknologi dan ekonomi. Ideologi dalam arti esensial bagi negara-negara tersebut tentunya tetap merupakan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan yang ingin mereka wujudkan bagi kepentingannya.

Suasana kritis reflektif yang disebutkan tadi juga menyadarkan betapa ideologi itu

dapat bergerak secara manipulatif. Walaupun di atas permukaan terjadi gelombang yang mengaspirasikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, namun di bawah permukaan tentulah masing-masing sedang berusaha membangun *adjustment* (penyesuaian) struktural yang paling tepat bagi kepentingan masing-masing.

Di sinilah dapat dikatakan bahwa globalisasi itu membawa situasi persimpangan sejarah bagi tataran internasional: dari satu pihak masing-masing bangsa dan negara masih tetap berpegang pada aspirasi dan konsepnya sendiri-sendiri, yang merupakan kelanjutan dari suasana ideologi lama, dan dari lain pihak gelombang globalisasi yang membawa interaksi internasional menjadi semakin menyeluruh menampilkan pula pada adanya aspirasi dan konsep yang dapat dijadikan acuan bersama.

Mungkin masih memerlukan pergumulan panjang apakah manusia dan kemanusiaan, sebagai gerakannya humanisme baru, akan dapat tumbuh dari situasi ini menjadi ideologi bersama untuk masa depan. Humanisme ini sudah tentu berbeda dengan humanisme yang berkembang pada abad ke-17, 18 dan 19, yang intinya adalah gerakan anti agama, dan kemudian juga mengalami keterpecahan antara humanisme teistik dan humanisme ateistik, serta antara berbagai sistem humanisme yang dibangun secara satu dimensional dogmatik dan diskriminatif sebagaimana disebutkan di atas. Humanisme ini juga tidak dapat hanya menjadi sekedar gerakan anti segala sesuatu, melainkan harus pula dapat membangun konsep dan cita-cita masyarakat, negara serta tatanan internasional dan kekuasaan yang dibangun secara struktural.

Memang tidak mengherankan apabila salah satu luapan dari gelombang ini adalah

munculnya aspirasi demokratisasi dan hak-hak asasi manusia, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala global. Pergulatan untuk ini kiranya masih panjang, karena demokratisasi politik, ekonomi dan hubungan antar bangsa, kiranya masih memerlukan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang mau dan mampu membawa arah sejarah ke arah itu.

Pancasila

Bagaimanakah posisi kita terlibat dan menghadapi perkembangan dan perubahan-perubahan global seperti itu? Pertanyaan ini menjadi relevan dan urgen karena kita secara sadar membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara atas dasar satu ideologi yang jelas yaitu Pancasila.

Dalam perkembangan ini kiranya kita perlu menyadari bahwa Pancasila adalah produk dari suatu proses. Proses tersebut adalah gerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai Indonesia merdeka yang terjadi pada kebangkitan nasional. Gerakan perjuangan kemerdekaan tersebut adalah gerakan yang sifatnya majemuk. Pluralisme merupakan sifat masyarakat Indonesia, pluralisme juga mewarnai gerakan menuju Indonesia Merdeka itu.

Problem ideologik yang dihadapi zaman kebangkitan nasional tersebut antara lain adalah pertanyaan: kalau suatu ketika nanti Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka itu untuk siapa? Kekuasaan ada di tangan siapa? Legitimasi dipegang siapa? Dan bagaimana implikasi strukturalnya?

Terjadinya permasalahan fundamental itu sebagaimana proses telah menghasilkan lahirnya Wawasan Kebangsaan Indonesia

sebagai produk. Dan dari sini kemudian terjadi Proklamasi Kemerdekaan, yang kemudian dilanjutkan dengan dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konstitusi dan Dasar Negara serta Ideologi.

Di dalam pergumulan dewasa ini, kiranya perlu kita lihat bersama bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah ideologi yang ingin menjawab problem kekuasaan. Apabila kita membaca alinea ke-4 Pembukaan Konstitusi kita, nampaklah betapa Pancasila itu adalah dasar bagi dibangunnya susunan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kedaulatan adalah sebuah konsep kekuasaan. Ia menunjuk pada adanya kekuasaan tertinggi. Pancasila sebagai ideologi menunjuk pada konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai dasar kekuasaan seperti itu Pancasila menolak bentuk-bentuk ideologi modern satu dimensional, dan Pancasila menempatkan kekuasaan (yang erat hubungannya dengan konsep masyarakat dan konsep negara) di dalam haribaannya nilai-nilai dasar eksistensi manusia (yang hakikatnya adalah koeksistensi) dan terbuka bagi aktualisasi vertikal maupun horisontal.

Dalam pemahaman seperti ini tidak jarang kami kemukakan bahwa Pancasila adalah bagaikan *Astabrata* Modern. Apabila *Astabrata* dalam kesusasteraan lama merupakan naskah yang memuat ajaran tentang kepemimpinan (yang erat hubungannya dengan kekuasaan), dengan mentransformasikan sifat-sifat alam ke dalam sifat-sifat kekuatan kekuasaan, maka Pancasila secara

langsung menempatkan kekuasaan itu dalam landasan sifat-sifat baik dari manusia dan kemanusiaan.

Dengan pemahaman ini kita dapat melihat bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka:

- terbuka karena tidak membangun sistem secara satu dimensional dogmatik dan struktural;
- terbuka karena menempatkan kekuasaan pada sifat dasar koeksistensi manusia yang multidimensional;
- terbuka karena secara internal tidak membatasi secara sosiologis-eksklusif dan secara internasional tidak menutup diri secara *chauvinistic*;
- terbuka karena mengamanatkan interpretasi kreatif dalam rangka aktualisasi, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun bangsa Indonesia harus membaca gerak putarannya alam dan zaman;
- terbuka karena ingin mewujudkan demokrasi politik, ekonomi, sosio-kultural dalam rangka mencapai setinggi-tingginya derajat kemanusiaan bangsa sebagai bagian dari keluarga bangsa-bangsa.

Esensi dari Pancasila sebagai ideologi nasional tentulah ingin memberi jawaban terhadap pertanyaan: cita-cita masyarakat, negara dan kekuasaan yang bagaimanakah menjadi pegangan perjuangan kita. Secara ideologik dapatlah dikatakan bahwa keterlibatan kita dengan perubahan global dewasa ini telah dilandasi oleh sebuah ideologi yang secara fundamental telah mengaspirasikan pada ideologi yang mengacu manusia dan kemanusiaan.

Walaupun demikian, kenyataan tersebut tidaklah berarti bahwa Pancasila telah memberikan jawaban operatif dan struktural siap

pakai untuk segala alam dan segala zaman. Di sinilah perlunya interpretasi kreatif dinamis dalam rangka aktualisasi ideologi nasional atau cita-cita perjuangan kebangsaan kita itu.

Berbeda dengan ideologi satu dimensional yang lazim bersifat agresif, Pancasila menjadi ideologi yang meminta adanya pemikiran yang sifatnya mendasar dan menyeluruh: mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi dari gelarnya masyarakat, negara dan kekuasaan.

Berbeda dengan ideologi yang membangun sistem kekuasaan atas dasar hidup, kehidupan dan kekuasaan, seperti Marxisme, Sosialisme, Kapitalisme (yang membangun sistem atas dasar pengembangan kekuatan ekonomi, pasar, sistem keuangan, industrialisasi sebagai acuannya), Pancasila mengamatkan nilai-nilai dasar yang untuk aktualisasinya diperlukan upaya membangun sarana-sarana yang tepat.

Perkembangan dunia akan menghadapkan bangsa kita yang membangun konsep negara, masyarakat dan kekuasaan atas dasar Pancasila itu dengan kekuatan-kekuatan yang membangun konsep, negara, masyarakat dan kekuasaan atas dasar ekonomi, teknologi dan kekuatan. Perkembangan dewasa ini juga membawa bangsa, negara dan masyarakat kita menjadi semakin struktural kaitannya dengan perkembangan sistem global.

Semua itu membawa amanat betapa kita harus mampu mengembangkan aspirasi perjuangan bangsa kita saat ini di dalam interaksi yang makin erat dengan gelombangnya, ideologi-ideologi dunia, dan bahkan dengan perkembangan dunia yang sedang dalam persimpangan sejarah: mencari ideo-

logi baru untuk masa depan bersama umat manusia.

Cita-cita demokrasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang memang telah menjadi bagian dari ideologi nasional harus berinteraksi dengan gelombang global yang juga makin mengaspirasikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Ini berarti bahwa kita harus berusaha agar konsep kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi maupun kekuasaan dalam lingkup kemasyarakatan, dapat makin menemukan wujud struktural secara nasional, karena sistem nasional itulah merupakan kekuatan kita untuk perca-turan dan pengumpulan kita dengan perkembangan dunia.

Konsensus-konsensus Kreatif Diperlukan

Interaksi berbagai sistem ideologi yang berada dalam suasana fluktuasinya gelombang perubahan-perubahan besar sejarah saat ini kiranya secara politis memerlukan kemampuan manusia untuk membangun konsensus-konsensus kreatif sebagai bagian menuju arah sejarah dalam rangka demokratisasi dan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Secara nasional itu berarti bahwa bangsa kita harus dapat membangun konsensus-konsensus kreatif baik dalam rangka aktualisasi ideologi nasional kita ke dalam maupun dalam rangka aktualisasi ideologi kita ke luar.

Tantangan besar bagi dunia politik, baik internasional maupun nasional adalah seberapa jauh kekuatan-kekuatan politik akan dapat membangun konsensus-konsensus itu.

Strategi Sebagai Metodologinya Ideologi

Apabila ilmu pengetahuan (yang dewasa ini makin dibedakan dengan ideologi, namun demikian akan menjadi bagian dari ideologi) mempunyai metodologinya sendiri yang disebut metodologi ilmiah, maka ideologi tentu pula mempunyai metodologinya sendiri.

Perkembangan dewasa ini mungkin menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan studi ataupun telaah strategik merupakan jalan atau metoda dalam aktualisasi sebuah ideologi. Studi strategik pada dasarnya adalah studi yang memusatkan perhatian pada kekuatan. Studi strategi adalah sebuah strategi yang bermuara pada pengambilan keputusan. Untuk itu maka strategi lazim dilakukan dengan melalui empat tahapan:

- tahap analitikal: di mana manusia mempertimbangkan medan strategik secara mendasar dan menyeluruh, memperhitungkan berbagai kemungkinan, dan kemudian mengungkapkan berbagai alternatif pilihan;
- tahap politikal: berdasarkan atas pertimbangan analitikal, strategi harus bermuara pada suatu *choice*, suatu pengambilan keputusan. Ini dilakukan melalui kegiatan politik;
- tahap teknikal: bila keputusan telah diambil dan ditetapkan, maka selanjutnya perlulah dilaksanakan. Dalam hal ini perlu sekali dipertimbangkan hubungan antara langkah strategik dan langkah taktik. Langkah taktik diambil dalam rangka mencapai amanat strategik. Tidak jarang langkah taktik menjadi langkah yang mengakibatkan deviasi dari amanat strategik;

- tahap evaluatif: pelaksanaan tersebut harus selalu dievaluasi agar amanat strategik dapat diaktualisasikan. Sementara itu evaluasi juga dapat menghasilkan masukan bagi gerak lebih lanjut di dalam medan yang selalu bergerak, berubah, berkembang.

Penutup

1. Gelombang globalisasi dan perubahan besar dewasa ini masih diwarnai oleh berbenturannya berbagai sistem dan ideologi, yang masing-masing sedang dipaksa untuk menemukan *adjustment* strategik dan struktural.
2. Perubahan-perubahan dewasa ini nampaknya telah membawa manusia bergumul dengan pertanyaan: ke manakah arah sejarah. Dan manusia dipacu untuk berusaha mengenali kekuatan yang mengubah sejarah tersebut dalam rangka mengelola dan menguasai arah sejarahnya. Dalam situasi demikian alam pikiran manusia tumbuh menjadi semakin ideologik.
3. Ideologi lama, khususnya yang mengacu kepada "knowledge, wealth and power" yang amat erat hubungannya dengan konsep dominasi masih amat mewarnai perkembangan dunia dewasa ini, walaupun menggelombang pula gugatan yang mengaspirasikan ideologi bersama umat manusia di masa mendatang, yang mengaspirasikan penempatan manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggal bersama.
4. Demokratisasi, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosio-kultural dan hak-hak asasi manusia (yang mungkin sudah mengejala pula di dalam *Decla-*

ration of Human Rights dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan diteruskan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta *Socio Economic and Cultural Rights* pada tahun 1966) kiranya merupakan bagian dari arus aspirasi pada ideologi manusia dan kemanusiaan.

5. Masih dibutuhkan pergumulan panjang untuk dapat menemukan terobosan-terobosan kepada sistem global (tata politik, tata ekonomi, tata dunia) yang humanis dan demokratis. Masing-masing sistem dan kekuatan masih bergumul untuk membangun posisinya sendiri-sendiri. Masih diperlukan kekuatan politik yang dapat membangun interaksi serta konsensus-konsensus untuk itu.

6. Dengan berpegang pada Pancasila sebagai ideologi nasional, kita telah membangun konsep kekuasaan yang didasarkan atas sifat-sifat dasar yang baik dari manusia dan kemanusiaan. Namun demikian, perjalanan di masa depan meminta kemampuan kreatif untuk dapat mewujudkan aktualisasi ideologi tersebut baik ke dalam maupun ke luar.

7. Ke dalam berarti bahwa perkembangan kehidupan bangsa kita akan meminta kemampuan bangsa ini secara bersama mengembangkan demokrasi dan meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa, dengan menata kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan kultural kemasyarakatan, dalam rangka aktualisasi kreatif ideologi nasional kita.

8. Ke luar berarti kemampuan kita untuk berintegrasi baik dalam tingkat ideologi maupun tingkat politik, untuk memanfaatkan berbagai unsur dari perkembangan dunia bagi meningkatnya pers-

taan, kemajuan peradaban, serta kebudayaan bangsa, dalam arti meningkatkan setinggi-tingginya derajat kemanusiaan bangsa, serta dalam rangka ikut berperanan secara aktif dalam merintis sistem dunia untuk masa mendatang.

9. Apabila dalam hal hak-hak asasi manusia di masa lampau kita secara taktis lebih berjalan secara defensif-reaktif (karena situasi eksternal juga masih fluktuatif dan tidak menentu), saat ini dan di masa mendatang, dengan makin memahami Pancasila sebagai ideologi nasional (yang membangun konsep kekuasaan dalam rangka demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur) kita secara taktis perlu lebih bergerak secara aktif, kreatif, manunggal dengan gelombang gerakan ideologi manusia dan kemanusiaan serta demokrasi. Kita berusaha membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang kuat. Bangsa yang kuat dalam arti ideologis-kultural. Negara yang kuat dalam arti demokratis-struktural.

10. Keberhasilan kita mewujudkan sistem nasional sebagai aktualisasi ideologi nasional kita adalah modal yang paling utama bagi keterlibatan kita dengan gerak perubahan dunia. Apabila 20 tahun yang lalu kita dapat menata kekuatan politik secara struktural dalam rangka demokrasi Pancasila, saat ini menjadi tugas bersama untuk menata kekuasaan ekonomi secara struktural dalam rangka demokrasi Pancasila itu pula.

11. Agar hal tersebut akan dapat berlangsung bagi kehidupan nasional dari satu bangsa, maka perhatian perlu ditujukan pada upaya mengangkat lapisan rakyat dan masyarakat yang lemah, untuk dapat secepatnya menjadi bagian yang

kreatif dari wujud sistem nasional yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan strategi membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat.

12. Proses demokratisasi dalam zaman pembangunan ini kiranya perlu dilihat sebagai proses yang berjalan dalam 3 tahap:

a) tahap inisial: dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat/masyarakat;

b) tahap partisipatif: dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat/masyarakat;

c) tahap emansipatorik: dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan dukungan pemerintah.

Tahap-tahap tersebut tidak harus dipandang sebagai proses yang berjalan unilinear. Ada bagian yang sudah siap dengan tahap ketiga, ada bagian yang masih berada dalam tahap inisial. Secara umum kita berada dalam upaya memperkuat tahap kedua untuk berjalan lebih lanjut ke tahap ketiga.

13. Gelombang perubahan besar dunia itu perlu kita hadapi dengan menyiapkan kekuatan nasional untuk masa depan melalui pendidikan.

14. Perubahan besar, baik struktural maupun kultural, terutama apabila Indone-

sia harus tumbuh menjadi masyarakat industri (tanpa membuat ekonomi dan teknologi menjadi ideologi, tetapi menjadi peradaban) akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu masyarakat memerlukan pendampingan, dalam membaca, memahami perubahan-perubahan, dan menemukan dukungan. Pendampingan kreatif-inovatif ini dapat dilakukan oleh Departemen Penerangan, dan kekuatan intelektual yang bergerak di medan media-komunikasi. *If culture is the soul of the nation, communication is the nerve of the nation* (jika kebudayaan merupakan jiwa dari bangsa, maka komunikasi adalah urat syaraf bangsa).

15. Menempatkan *knowledge, wealth* dan *power* dalam konteks aktualisasi koeksistensi manusia di dalam alam sejarah adalah menempatkan ideologi dalam konteks kebudayaan. Pluralisme sistem dan aliran ideologi yang mewarnai gelombang perubahan dewasa ini dan membawa nasionalisme dan internasionalisme berada pada persimpangan sejarah, akan berjalan pula mencari titik konvergensi. Apabila aspirasi pergumulan dalam mengelola perubahan dan arah sejarah harus menuju pada manusia dan kemanusiaan sebagai acuan bersama, mungkin hal ini berarti kebudayaan akan menjadi titik konvergensi untuk masa depan.